

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Pustaka

2.1.1 Pengertian Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat pada hakikatnya adalah upaya memberdayakan masyarakat. Kartasasmitha (1996) menyatakan bahwa dalam konteks masyarakat, pemberdayaan merupakan faktor kunci yang memungkinkan masyarakat dapat bertahan dan berkembang secara dinamis untuk mencapai kemajuan. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat masyarakat kelas bawah yang tidak terlepas dari kemiskinan dan keterbelakangan. (dari Elak Nathaniel 2008:49).

Prijono (1996) mengatakan bahwa dalam spektrum yang lebih luas Memberdayakan rakyat (masyarakat) berarti mengembangkan, kemandirian, dan memberdayakan daya tawar-menawar masyarakat kelas bawah terhadap kekuatan opresif semua bidang. selain itu dapat bermakna perlindungan dan Pertahanan dengan mengacu pada yang rentan terhadap persaingan global yang belum seimbang seimbang terhadap eksploitasi kepada golongan yang rentan.(dalam Elake Nataniel 2008:49-50).

Ife (1995) mendefinisikan pemberdayaan masyarakat sebagai proses mempersiapkan masyarakat dengan beragam sumber daya, kapasitas, pengetahuan, dan pengalaman untuk membentuk masa depan masyarakat dan

meningkatkan kemampuannya untuk berpartisipasi dan mempengaruhi masyarakat itu sendiri. (dari Nanang Martono 2014:374).

Pemberdayaan menunjukkan kemampuan seseorang, terutama kelompok rentan dan lemah sehingga mereka mewakili kekuatan atau kompetensi dengan cara yang berbeda. *Pertama*, kebutuhan dasar mereka terpenuhi, sehingga mereka bebas, dalam arti tidak hanya bebas menyampaikan pendapat, tetapi juga bebas dari kelaparan, kebodohan, atau kesakitan. *Kedua*, menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya serta memperoleh barang-barang dan jasa yang mereka perlukan. *Ketiga*, partisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhinya Suharto (2005) (Nanang Martono 2014: 375).

Suharto (2005:60) Pemberdayaan adalah proses dan tujuan Pemberdayaan sebagai proses adalah serangkaian kegiatan yang bertujuan untuk memberdayakan atau memberdayakan kelompok yang kurang beruntung dalam masyarakat, termasuk mereka yang hidup dalam kemiskinan. Pemberdayaan sebagai tujuan mengacu pada kondisi atau hasil yang dicapai melalui perubahan sosial. Artinya, orang yang mandiri atau memiliki pengetahuan dan keterampilan untuk memenuhi kebutuhan materi, ekonomi dan sosial, seperti: Menyelesaikan tugas hidup yang melibatkan pertukaran keyakinan dan aspirasi. Pemahaman pemberdayaan sebagai tujuan sering dijadikan sebagai indikator keberhasilan pemberdayaan sebagai suatu proses.

Menurut Shortlow, pemberdayaan pada dasarnya menggambarkan bagaimana individu, kelompok, atau komunitas mengendalikan hidup mereka dan berusaha membentuk masa depan yang mereka pilih. Intinya, prinsip ini mendorong klien untuk memutuskan sendiri apa yang harus mereka lakukan untuk mengatasi masalah yang mereka hadapi, sehingga mereka memiliki kesadaran dan kekuatan

penuh dalam membentuk masa depan mereka sendiri. (Isbandi.Rukminto.Adi.,2015:78-79).

Beberapa upaya pemberdayaan dapat dilakukan dalam tiga arah menurut Kartasasmita yang dikutip oleh Zubaedi (2013:79), yaitu:

- a. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi rakyat berkembang (*enabling*).
- b. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*).
- c. Melindungi masyarakat (*protection*).

Selain itu, pemberdayaan masyarakat tani yang dikutip Shinta (2014:5) meliputi:

- a) Pemberdayaan petani, yaitu mengubah perilaku petani dari petani subsistem tradisional menjadi petani modern dari perspektif agribisnis.
- b) Pemberdayaan kelembagaan petani dengan menumbuh kembangkan kelembagaan petani dari kelompok tani menjadi kelompok tani, asosiasi, koperasi dan korporasi (Badan Usaha Milik Petani).
- c) Pemberdayaan Penguatan pertanian dengan menumbuhkan rasa kewirausahaan dan pengembangan pertanian melalui kerjasama antara petani dan pemangku kepentingan lainnya.

Lebih khusus lagi, Slamet (2003) menekankan bahwa esensi dari pemberdayaan adalah masyarakat mengetahui bagaimana mengembangkan diri dan meningkatkan taraf hidupnya. Istilah kompeten di sini adalah: berdaya, memahami, termotivasi, memiliki peluang, melihat dan menangkap peluang, energik, mendukung, menyadari alternatif mampu mengambil keputusan, berani mengambil risiko, mencari dan menangkap informasi, serta bertindak atas inisiatif. (Oos M. Anwas 2013:49-50).

Pemberdayaan mengacu pada kemampuan masyarakat, terutama kelompok yang kurang beruntung dan rentan, untuk:

- a. Memperoleh akses ke sumber daya produktif untuk meningkatkan pendapatan mereka dan memperoleh barang dan jasa yang mereka butuhkan.
- b. Berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan yang mempengaruhi mereka.

Pemberdayaan mengacu pada upaya untuk mendistribusikan kembali kekuasaan melalui perubahan struktur sosial (Swift dan Levin dalam Totok dan Poerwoko 2013:2728).

Pemberdayaan mengandung arti perbaikan mutu hidup atau kesejahteraan setiap individu dan masyarakat baik antara lain dalam arti:

1. Perbaikan ekonomi, dan kecukupan pangan
2. Perbaikan kesejahteraan sosial (pendidikan dan Kesehatan)
3. Kemerdekaan dari segala bentuk penindasan
4. Terjaminnya keamanan
5. Terjadinya hak asasi manusia yang bebas dari rasa-takut dan kekhawatiran (Totok dan Poerwoko 2013:28).

Pemberdayaan adalah proses dimana setiap orang menjadi cukup kuat untuk berpartisipasi dalam mengendalikan dan mempengaruhi peristiwa dan institusi yang mempengaruhi kehidupan mereka. Pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya (Parsons, et al, dalam Totok dan Poerwoko 2013:29)

Menurut Wrihatnolo (2007:2), pemberdayaan bukanlah proses instan melainkan proses menjadi. Sebagai sebuah proses, proses pemberdayaan memiliki tiga langkah, yaitu:

- 1) Kesadaran. Pada titik ini, target yang diberdayakan menerima pencerahan dalam bentuk kesadaran bahwa ada sesuatu yang berutang kepada mereka.
- 2) Kapasitas. Kita sering menyebutnya capacity building atau mudah dilakukan. Untuk mendapatkan kekuasaan, para pihak harus bisa melakukannya.
- 3) Memberdayakan diri sendiri atau memberdayakan diri sendiri. Pada titik ini, target memperoleh kekuasaan, kekuasaan, otoritas, atau kesempatan. Penghargaan ini sesuai dengan kualitas sumber yang ada.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan di atas, pemberdayaan masyarakat dapat didefinisikan sebagai suatu proses peningkatan kondisi kehidupan dan penghidupan yang ditujukan pada partisipasi aktif masyarakat sehingga mereka dapat 'membantu diri mereka sendiri', dengan kata lain, upaya masyarakat untuk belajar bersama. kemandirian dan pemberdayaan masyarakat untuk mengatasi dan mencari solusi atas permasalahan yang dihadapinya sesuai dengan potensi dan sumber daya lokal yang ada di masyarakat.

2.1.2 Tahap-Tahap Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat melalui beberapa tahapan, pertama, masyarakat mengembangkan kesadaran awal untuk dapat melakukan suatu kegiatan untuk meningkatkan taraf hidup seseorang dan memperoleh seperangkat keterampilan untuk dapat bekerja dengan baik. -kepercayaan Ketika keterampilan dan kepercayaan diri meningkat, orang bekerja sama untuk melatih diri mereka sendiri

untuk membuat lebih banyak keputusan dan dapat memilih sumber daya yang akan berdampak pada kesejahteraan mereka (Hiryanto, 2010: 1).

Apabila dalam proses pemberdayaan, tahapan-tahapan dapat dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku maka akan tercipta suatu kegiatan pemberdayaan yang baik. Dengan melalui tahapan-tahapan yang ada, orang-orang yang sebelumnya berada pada ketidakberdayaan secara bertahap akan terbebas dari belenggu tersebut. Tanpa kesadaran dan kemauan yang besar, pemberdayaan tidak akan mencapai tujuannya. Oleh sebab itu, dibutuhkan kerjasama antara masyarakat, pemerintah maupun dari pihak swasta untuk menangani dan turun langsung dalam proses pemberdayaan.

Tahapan kegiatan pemberdayaan masyarakat pada setiap individu dalam suatu organisasi merupakan suatu siklus kegiatan yang terdiri dari : (Wilson dalam Totok dan Poerwoko, 2013: 112-123).

- a. *Pertama*, menumbuhkan keinginan seseorang untuk berubah dan memperbaiki, yang merupakan titik awal pemberdayaan.
- b. *Kedua*, menumbuhkan kemauan dan keberanian untuk melepaskan diri dari kesenangan/kenikmatan dan atau hambatan-hambatan yang dirasakan, untuk kemudian mengambil keputusan mengikuti pemberdayaan demi terwujudnya perubahan dari perbaikan yang diharapkan.
- c. *Ketiga*, mengembangkan kemampuan untuk mengikuti atau mengambil bagian dalam kegiatan pemberdayaan yang memberikan manfaat atau perbaikan keadaan.
- d. *Keempat*, peningkatan peran atau partisipasi dalam kegiatan pemberdayaan yang telah dirasakan manfaat/perbaikannya.
- e. *Kelima*, peningkatan peran dan kesetiaan pada kegiatan pemberdayaan, yang ditunjukkan berkembangnya motivasi untuk melakukan perubahan.

- f. *Keenam*, peningkatan efektivitas dan efisiensi kegiatan pemberdayaan.
- g. *Ketujuh*, peningkatan kapasitas untuk menciptakan perubahan melalui kegiatan pemberdayaan baru.

2.1.3 Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Ini termasuk kemampuan untuk berpikir, bertindak dan mengendalikan tindakan mereka sendiri. Pemberdayaan masyarakat harus mengarah pada masyarakat yang berpengetahuan lebih baik. Keadaan kognitif adalah kemampuan untuk berpikir kritis, berdasarkan akumulasi pengetahuan dan pemahaman seseorang atau masyarakat. Hal ini memungkinkan untuk penyelesaian masalah. Kondisi konatif adalah sikap perilaku masyarakat yang terbentuk, yang diarahkan pada perilaku peka terhadap pembangunan dan pemberdayaan. Pengkondisian afektif adalah bagian dari masyarakat yang dapat diintervensi untuk meningkatkan sikap dan perilaku. Kemampuan psikomotorik adalah keterampilan yang dimiliki masyarakat untuk mendukung mereka dalam melakukan kegiatan pembangunan manusia. Adapun pemberdayaan dari keempat aspek adalah (kognitif, konatif, afektif dan psikomotorik) yang membantu mencapai kemandirian masyarakat yang diinginkan (Ambar T. Sulistyani, 2004:80).

Pemberdayaan masyarakat bertujuan agar masyarakat menjadi mandiri, artinya mereka dapat memiliki kemampuan untuk memecahkan masalah yang dihadapinya, dan dapat memenuhi kebutuhannya dengan tidak mengambil keuntungan dari dirinya sendiri, kepada pihak luar, baik pemerintah maupun organisasi non-pemerintah.

Tujuan pemberdayaan meliputi beragam upaya perbaikan sebagai berikut:
(Totok dan Poerwoko 2013:111-112)

- a. Perbaikan pendidikan (better education), Dalam hal pemberdayaan, pendidikan perlu dilihat sebagai bentuk yang lebih baik.
- b. Perbaikan Aksesibilitas (better Accessibility) perlu ditingkatkan, terutama dalam hal akses terhadap sumber informasi/inovasi, sumber pendanaan, pemasok produk dan peralatan, dan lembaga pemasaran, dengan mendorong dan mengembangkan semangat belajar sepanjang hayat.
- c. Perbaikan tindakan (better action), Pendidikan yang lebih baik, peningkatan aksesibilitas, dan pemanfaatan berbagai sumberdaya yang lebih baik diharapkan akan menghasilkan perilaku yang lebih baik.
- d. Perbaikan kelembagaan (better institution), Perbaikan kelembagaan, termasuk pengembangan jaringan kemitraan usaha, diharapkan melalui perbaikan kegiatan dan tindakan yang dilaksanakan.
- e. Perbaikan usaha (better business) ,Peningkatan upaya tersebut diharapkan dapat dilakukan melalui peningkatan pendidikan (semangat belajar), peningkatan ketersediaan kegiatan (aksesibilitas) dan perbaikan kelembagaan.
- f. Perbaikan pendapatan (better income), Seiring dengan berkembangnya usaha, diharapkan pendapatan yang diperoleh akan meningkat, termasuk pendapatan keluarga dan masyarakat.
- g. Perbaikan Lingkungan (better environment), Peningkatan pendapatan ditujukan untuk perbaikan lingkungan (fisik dan sosial), karena kerusakan lingkungan seringkali disebabkan oleh kemiskinan dan keterbatasan pendapatan.
- h. Perbaikan Kehidupan (better living), Meningkatkan tingkat pendapatan dan lingkungan yang ditujukan untuk meningkatkan kondisi kehidupan bagi semua keluarga dan masyarakat.
- i. Perbaikan masyarakat (better community), Kondisi kehidupan yang lebih baik didukung oleh lingkungan yang lebih baik (fisik dan sosial)

mengarah pada kehidupan masyarakat yang lebih baik.

2.1.4 Unsur-unsur Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat setidaknya ada 4 (empat) unsur pokok yang perlu di perhatikan dalam upaya pemberdayaan masyarakat, yaitu:

- 1) Aksesibilitas informasi, karena informasi merupakan kekuatan baru dalam hal peluang, layanan, penegakan, efektivitas negosiasi, dan akuntabilitas.
- 2) Keterlibatan atau partisipasi, ini mempengaruhi orang-orang yang terlibat dan bagaimana mereka berpartisipasi dalam keseluruhan proses pembangunan.
- 3) Akuntabilitas mengacu pada pertanggungjawaban publik atas segala kegiatan yang dilakukan atas nama rakyat.
- 4) Kapasitas organisasi lokal, terkait dengan kemampuan untuk bekerja sama, mengorganisir anggota masyarakat dan memobilisasi sumber daya untuk memecahkan masalah yang mereka hadapi (Edi Suharto 2005).

2.1.5 Syarat Tercapainya Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Untuk mencapai tujuan pemberdayaan masyarakat, ada tiga jalur tindakan yang perlu dilakukan, yaitu:

- 1) Menciptakan lingkungan yang memelihara dan mendukung potensi masyarakat. Titik tolaknya adalah pengakuan bahwa setiap manusia dan masyarakat memiliki kemampuan (kekuatan) untuk berkembang.
- 2) Pemberdayaan adalah upaya membangun kekuatan itu dengan cara membangkitkan kesadaran, memotivasi, meningkatkan, dan berusaha mengenali potensi diri, serta berupaya untuk mengembangkannya.
- 3) Penguatan potensi atau daya masyarakat. (empowering).(Edi Suharto 2005).

2.1.6 Indikator Keberdayaan

Persons et.al. (dalam Suharto, 2005:63) mengajukan tiga dimensi pemberdayaan yang merujuk pada:

- a. Sebuah proses pembangunan yang bermula dari pertubuhan individu yang kemudian berkembang menjadi sebuah perubahan sosial yang lebih besar.
- b. Sebuah keadaan psikologis yang ditandai oleh rasa percaya diri, berguna dan mampu mengendalikan diri dari orang lain.
- c. Pembebasan yang dihasilkan dari sebuah gerakan sosial, yang di mulai dari pendidikan dan politasi orang-orang lemah melibatkan upaya-upaya kolektif dari orang-orang lemah tersebut untuk memperoleh kekuasaan dan mengubah struktur yang masih menekan.

2.1.7 Strategi Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Suharto (Tjahya Supriyatna dalam Moh. Ali Aziz dan Suhartini 2018 :8-9), secara umum ada empat strategi pembangunan masyarakat yaitu :

a. *The growth strategy*

Penerapan srategi pertumbuhan ini pada umumnya dimaksudkan untuk mencapai peningkatan yang cepat dalam nilai ekonomis, melalui peningkatan pendapatan per kapita penduduk, produktivitas, pertanian, permodalan dan kesempatan kerja yang dibarengi dengan kemampuan konsumsi masyarakat terutama dipedesaan. Pada awalnya strategi ini dianggap afektif. Akan tetapi, kerana economic oriented sementara kaidah hukum-hukum sosial dan moral terabaikan maka yang terjadi adalah sebaliknya, yakni semakin melebarnya pemisah kaya miskin, terutama di daerah pedesaan. Akibatnya begitu terjadi

krisis ekonomi maka konflik dan kerawanan sosial sering terjadi di mana-mana.

b. *The welfare strategy*

Strategi kesejahteraan ini pada dasarnya dirancang untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Akan tetapi, karena tidak dibarengi dengan pembangunan kultur dan budaya mandiri dalam diri masyarakat maka yang terjadi adalah sikap ketergantungan masyarakat pada pemerintah. Oleh karena itu, salah satu aspek yang perlu diperhatikan dalam setiap pengembangan masyarakat adalah masalah kultur dan budaya masyarakat. Pembangunan budaya tidak boleh kontraproduktif dengan pembangunan ekonomi. Dalam konteks ini, mahar dengan model *community development* sangat relevan karena salah satu tujuannya adalah memperjuangkan budaya mandiri di masyarakat.

c. *The Responsitive strategy*

Strategi ini merupakan reaksi terhadap strategi kesejahteraan, yang dimaksudkan untuk menanggapi kebutuhan yang dirumuskan masyarakat sendiri dengan bantuan pihak luar (*see need and assistance*) untuk memfasilitasi usaha mandiri dengan pengadaan teknologi dan sumber daya yang tepat dalam memenuhi kebutuhan proses pembangunan. Akan tetapi, karena pemberdayaan masyarakat sendiri belum dilakukan maka strategi yang tanggap terhadap kebutuhan masyarakat ini terlalu idealistik dan sulit ditransformasikan kepada masyarakat. Salah satu hal yang harus diperhatikan, kecepatan teknologi sering kali, bahkan selalu tidak diimbangi dengan

kesiapan masyarakat dalam menerima dan memfungsikan teknologi itu sendiri. Akibatnya, teknologi yang di pakai dalam penerapan strategi ini jadi disfungsional.

d. The integrated or holistic strategy

Untuk mengatasi dilema pengembangan masyarakat kerana kegagalan ketiga strategi seperti telah dijelaskan, maka konsep kombinasi dari unsur-unsur pokok etika strategi di atas menjadi alternatif terbaik. Strategi ini secara sistematis mengintegrasikan semua komponen dan elemen yang diperlukan. Yakni ingin secara bersamaan mencapai tujuan yang terkait dengan pertumbuhan berkelanjutan, pemerataan kesejahteraan, dan partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan masyarakat.

2.1.8 Ketidakberdayaan Masyarakat

Suharto (dalam Nawawi, 2012:114), menyatakan bahwa ketidakberdayaan ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti: ketiadaan jaminan ekonomi, ketiadaan pengalaman dalam area politik, ketiadaan akses terhadap informasi, ketiadaan dukungan finansial, ketiadaan pelatihan-pelatihan dan adanya ketegangan fisik maupun emosional. Ketidakberdayaan yang dialami oleh sekelompok orang merupakan hasil dari proses internalisasi yang dihasilkan dari interaksi mereka dengan masyarakat.

Learner lebih jauh menjelaskan konsep ketidakberdayaan ini sebagai proses dimana orang merasa tidak berdaya melalui pembentukan seperangkat pikiran emosional, intelektual dan spriritual yang mencegahnya dari pengaktualisasian kemungkinan-kemungkinan yang sebenarnya ada. Sedangkan menurut salomo (1979) melihat bahwa ketidakberdayaan dapat bersumber dari penilaian diri yang negative, iteraksi yang negatif dengan lingkungan, atau berasal dari *blockade* dan halaman yang berasal dari lingkungan yang lebih besar.

Beberapa kelompok masyarakat yang dapat dikategorikan sebagai kelompok tidak berdaya meliputi, yaitu:

1. Kelompok lemah secara struktural, baik lemah secara gender, maupun etnis
2. Kelompok lemah khusus, seperti manula, anak-anak dan remaja, penyandang cacat, gay, lesbian dan masyarakat asing.
3. Kelompok lemah secara personal, yakni mereka yang mengalami masalah pribadi dan masalah keluarga.

2.1.9 Penyuluhan dan Pemberdayaan

Penyuluhan dan pemberdayaan adalah konsep yang memiliki tujuan sama yaitu memberdayakan klien atau entitas. Menurut pakar penyuluhan pembangunan dari IPB Bogor, Prof Margono Slamet (2000), pemberdayaan masyarakat adalah ungkapan lain dari tujuan penyuluhan pembangunan. Hal yang sama dijelaskan Sumarjo (2008) bahwa kesejajaran antara penyuluh dan pengembangan masyarakat adalah dalam upaya meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui partisipasi masyarakat (dalam Oos M. Anwas 2013:52).

Menurut Van Den Ban & Hawkins (1999), penyuluh adalah keterlibatan seseorang melakukan komunikasi keterangan informasi secara sadar menggunakan tujuan membantu sesamanya menaruh pendapat sebagai akibatnya sanggup menciptakan keputusan yg benar. Mengacu pada beberapa kajian di atas, penyuluhan bisa didefinisikan menjadi sistem pendidikan non formal pada membarui perilaku manusia yang didasarkan dalam kebutuhan dan potensi klien untuk meningkatkan kehidupannya ke arah yg lebih baik (pada Oos M. Anwas 2013:53).

Dalam pelaksanaan penyuluhan, penyuluh perlu menghayati filsafah penyuluh. Falsafah dasar penyuluh menurut Slamet (sumardjo, 1999) adalah *pertama* penyuluhan adalah proses pendidikan, *kedua* penyuluhan adalah proses demokrasi, *ketiga* penyuluhan adalah proses kontinyu. Oleh karena itu falsafah penyuluhan bermakna menolong orang agar orang tersebut menolong dirinya sendiri, melalui pendidikan yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraannya (dalam Oos M. Anwas 2013:53).

Dalam penyuluhan dan pemberdayaan, klien atau sasaran merupakan subjek, bukan sebaliknya menjadi objek. Menurut Sumardjo (1999), filosofi dan prinsip-prinsip penyuluhan dalam arti yang sebenarnya adalah partisipatif, dialogis, konvergen dan demokratis, sehingga memberdayakan, dan bukannya praktik-praktik penyuluhan yang bersifat *top down*, linier dan bertentangan dengan filosofi pembangunan manusia. Penyuluhan harus mampu menumbuhkan cita-cita yang melandasi untuk selalu berpikir kreatif dan dinamis, mengapa kepada kenyataan yang di temukan di lapangan atau harus selalu di sesuaikan dengan keadaan dilapangan (dalam Oos M. Anwas 2013:54).

Berdasarkan yang telah diuraikan diatas maka penyuluh harus mampu menciptakan kondisi masyarakat yang benar-benar aktif dan berdaya dalam meningkatkan kualitas kehidupannya. Oleh karena itu, penyuluhan dan pemberdayaan pada hakekatnya sama. Artinya, untuk membangkitkan partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya, Yang berdasarkan kebutuhan dan petensi yang ada pada masyarakat secara nyata, dapat dilakukan secara bertahap dan kontinyu

atau terus menerus dan menyentuh semua aspek kehidupan manusia (holistik) (Oos M. Anwas 2013:54).

2.1.10 Penyuluh Pertanian

Menurut Van Den Ban & Hawkins (1999), penyuluh adalah keterlibatan seseorang melakukan komunikasi keterangan informasi secara sadar menggunakan tujuan membantu sesamanya menaruh pendapat sebagai akibatnya sanggup menciptakan keputusan yg benar. Mengacu pada beberapa kajian di atas, penyuluhan bisa didefinisikan menjadi sistem pendidikan non formal pada membarui prilaku manusia yang didasarkan dalam kebutuhan dan potensi klien untuk meningkatkan kehidupannya ke arah yg lebih baik (pada Oos M. Anwas 2013:53).

Ilmu penyuluh pembangunan sebagai suatu disiplin ilmu yang mempelajari tentang bagaimana pola perkembangan perilaku manusia terbentuk, dan bagaimana perilaku manusia dapat diubah sehingga mau meninggalkan kebiasaan lama dan diganti dengan perilaku baru yang mengarah kepada kualitas hidup yang lebih baik. Slamet (1992). Penyuluh merupakan sistem pembelajaran non formal untuk mengubah perilaku klien yang dikehendaki atau direncanakan (Asngari 2001). Perilaku tersebut mengacu kepada Taksonomi Bloom terdiri dari ranah pengetahuan (kognitif), sikap (afektif), dan Keterampilan (psikomotor) (dalam Oos M. Anwas 2013:53).

Sebagai proses pendidikan non-formal, penyuluhan harus memberikan saran yang harus mengubah aspek pengetahuan, prilaku dan keterampilan secara positif.

Penyuluh juga harus menyesuaikan dengan kebutuhan dan potensi yang pada klien. Klien atau sasaran adalah subjek penyuluhan. Proses penyuluhan juga harus didasarkan pada suasana demokratis, menghindari unsur paksaan, dialog, tukar pikiran dan pengalaman dalam menyelesaikan masalah yang dihadapi klien. Penyuluhan juga membutuhkan pendekatan interdisiplin untuk memecahkan masalah yang dihadapi klien. Dengan kata lain penyuluhan perlu dilakukan dengan pendekatan holistik, yaitu menyangkut semua aspek kehidupan yang ada dimasyarakat. Yang tidak kalah pentingnya adalah penyuluhan tidak dapat dilakukan secara berkelanjutan (kontinyu) karena manusia selama hidupnya senantiasa dihadapkan pada kebutuhan dan masalah (dalam Oos M. Anwas 2013:53).

Hakikat Penyuluhan Pertanian adalah pendidikan non formal dalam mengubah perilaku sasaran baik aspek kognitif, afektif maupun psikomotor ke arah yang lebih baik sesuai dengan potensi dan kebutuhannya ini berarti sasaran dari penyuluhan adalah pembangunan yang berpusat pada manusia (Oos M. Anwas 2013:54).

Strategi penyuluhan pertanian dalam konteks pemberdayaan petani menurut Martaamidjaja (1998) bertujuan supaya petani mampu menangkap peluang yang ada di wilayah usaha pertaniannya. Pada gilirannya mereka mampu bergerak menjadi pelaksana pembangunan pertanian, sesuai dengan kemampuannya, potensi wilayah mereka, serta sesuai dengan potensi serta peluang yang ada di desanya (dalam Oos M. Anwas 2013:54).

Berdasarkan yang telah diuraikan diatas maka penyuluh harus mampu menciptakan kondisi masyarakat yang benar-benar aktif dan berdaya dalam

meningkatkan kualitas kehidupannya serta mampu melakukan perubahan perilaku menuju kearah kemandirian baik berupa pengetahuan, sikap, maupun keterampilan yang berguna untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan kesejahteraannya.

2.1.11 Pengertian Kelompok Tani

Kelompok tani adalah komunitas yang mengacu pada karakteristik informal seperti sosial, ekonomi, sumber daya, keakraban, kepentingan bersama dan rasa saling percaya serta memiliki kepemimpinan untuk mencapai tujuan bersama (BPLPP, 1990).

Selain itu, kelompok tani dapat berfungsi sebagai forum untuk musyawarah dan pengambilan keputusan bersama, memungkinkan penerapan langkah-langkah yang selaras dengan tujuan kelompok. Anggota kelompok tani yang mengadopsi teknologi baru mungkin dapat memantau dan mengubah perilaku mereka sehingga mereka dapat melakukan kegiatan pertanian sesuai dengan rekomendasi yang ditetapkan (Santoso, 1992). Peran ini merupakan upaya peningkatan produksi dan pendapatan petani serta upaya bersama antara pemerintah dan masyarakat pertanian dalam pembangunan pertanian pedesaan. Pemerintah bekerja sama dengan masyarakat pertanian untuk membantu meningkatkan produksi dan pendapatan mereka.

Menurut Santoso (2004) pemahaman kelompok tani meliputi unsur-unsur:

1. Kelompok tani merupakan unit kerja sama yang memiliki kepentingan bersama dalam mencapai tujuannya.

2. Atas dasar kesadaran, keakraban, kesamaan kepentingan dan rasa saling percaya menjadi dasar terbentuknya aglomerasi petani.
3. Sebagai deklarasi keinginan murni petani.

2.1.12 Fungsi Kelompok Tani

Menurut Kartosapoetra (1994), kelompok tani dibentuk berdasarkan kesadaran individu, sehingga tidak dipaksakan. Kelompok tani ini menginginkan terwujudnya pertanian yang baik, pertanian yang optimal dan keluarga petani yang sejahtera dalam pembangunan kehidupannya. Para anggota didorong untuk berbagi pandangan yang sama, karena mereka memiliki minat yang sama berdasarkan kekerabatan. Dari uraian di atas dapat dikatakan bahwa anggota kelompok tani berfungsi sebagai wadah pemeliharaan dan pelatihan, pemahaman pengetahuan dan keterampilan, serta koperasi pertanian antar anggota.

Yang dimana Fungsinya dijabarkan dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

1. Pengadaan fasilitas produksi yang hemat biaya melalui pembelian bersama.
2. Sumber benih yang tahan untuk melayani kepentingan anggotanya.
3. Upayakan pemberantasan, pengendalian hama dan penyakit terpadu.
4. Demi kepentingan bersama, mereka berusaha memperbaiki prasarana yang mendukung pertanian mereka.
5. Penguatan cara bercocok tanam dengan mengadakan demonstrasi cara bercocok tanam, pembibitan dan cara mengatasi hama, dilakukan bersama pembimbing.

6. Mengatur pemrosesan produk bersama untuk mencapai kualitas dan variasi yang baik, dan upaya pemasaran bersama untuk mencapai harga yang seragam.

Penyuluh pertanian sebagai kontak tani bagi kelompok tani tidak hanya memberikan materi kegiatan kelompok, tetapi juga bertindak sebagai pengarah, pembimbing dan membimbing serta sebagai kekuatan pendorong di belakang kelompok. Menurut Marzuki (2004), kelompok tani memiliki tiga peran penting, yaitu:

1. Sosial atau media sosial penyuluh yang hidup, alami dan dinamis.
2. Alat untuk mewujudkan perubahan sesuai dengan tujuan penyuluh pertanian.
3. Tempat atau wadah untuk mengekspresikan keinginan yang murni dan sehat, sesuai dengan keinginan petani itu sendiri.

Selain itu, dengan adanya program penyuluhan diharapkan dapat meningkatkan partisipasi anggota kelompok tani, seperti meningkatkan usaha pertanian, dan meningkatkan pendapatan pada tingkat kesejahteraan. Kemampuan masing-masing kelompok tani biasanya memiliki perbedaan keterampilan, pengetahuan dan modal. Perbedaan tersebut muncul karena setiap petani memiliki karakteristik yang berbeda dan membutuhkan kerjasama antar anggota kelompok tani.

2.1.13 Prinsip-Prinsip Organisasi Petani

Dibentuk untuk memfasilitasi anggotanya untuk mencapai sebagian dari apa yang mereka butuhkan dan/atau inginkan, dengan kesadaran bahwa setiap anggota

ingin dan akan berusaha agar kelompok benar-benar efektif dalam menjalankan fungsinya, dengan memaksimalkan kualitas interaksi/kerjasama. dalam memanfaatkan segala potensi yang ada. Anggota dan lingkungannya untuk mencapai tujuan kelompok.

2.1.14 Karakteristik anggota kelompok tani

Menurut Soekanto (1986), ada beberapa hal yang harus menjadi ciri kelompok yaitu setiap anggota kelompok harus sadar sebagai bagian dari kelompok ada hubungan timbal balik antara sesama anggota, dan terdapat suatu faktor yang dimiliki bersama oleh para anggota sehingga hubungan diantara mereka semakin kuat. Selanjutnya Winardi (2004), mengemukakan bahwa yang menjadi ciri-ciri suatu kelompok adalah:

1. Ada interaksi antar anggota yang berlangsung secara kontinyu untuk waktu yang relatif lama.
2. Setiap anggota menyadari bahwa ia merupakan bagian dari kelompok, dan sebaliknya kelompoknyapun mengakuinya sebagai anggota.
3. Adanya kesepakatan bersama antar anggota mengenai norma-norma yang berlaku, nilai-nilai yang dianut dan tujuan atau kepentingan yang akan dicapai.
4. Adanya struktur dalam kelompok, dalam arti para anggota mengetahui adanya hubungan-hubungan antar peranan, norma tugas, hak dan kewajiban yang semuanya tumbuh di dalam kelompok itu.

Menurut Soedijanto (1999), pengelompokan petani yang bermacam-macam mendasarkan pada kemampuan kelompok tani yang dapat diklasifikasikan menjadi empat kelompok tani yaitu kelompok pemula, kelompok lanjut,

kelompok madya, dan kelompok utama. Adapun ciri-ciri setiap kelas kelompok tani adalah sebagai berikut:

- a. Kelompok tani pemula adalah kelas terbawah dan terendah dengan mempunyai nilai 0 sampai dengan 250.
- b. Kelompok tani lanjut adalah kelas yang lebih tinggi dari kelas pemula dimana kelompok tani –nelayan sudah melakukan kegiatan perencanaan meskipun masih terbatas dengan mempunyai nilai 251 sampai dengan 500.
- c. Kelompok tani madya adalah kelas berikutnya setelah kelas lanjut dimana kemampuan kelompok tani-nelayan lebih tinggi dari kelas lanjut yaitu dengan nilai 501 sampai dengan 750.
- d. Kelompok tani utama adalah kelas kemampuan kelompok yang tertinggi dimana kelompok tani-nelayan sudah berjalan dengan sendirinya atas dasar prakarsa dan swadaya sendiri nilai kemampuan diatas 750.

Pemilihan pengurus tiap kelompok tani dan anggotanya dilakukan secara musyawarah sehingga diperoleh kesepakatan kelompok dan dukungan masyarakat dan instansi terkait. Susunan kepengurusan kelompok tani minimal terdiri dari ketua, sekretaris dan bendahara serta dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan kelompok. Tugas dan tanggung jawab anggota kelompok tani adalah:

1. Bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan usahatani.
2. Wajib mengikuti dan melaksanakan petunjuk pengurus kelompok tani dan petugas/penyuluh serta kesepakatan yang berlaku.
3. Wajib bekerja sama dan akrab antar sesama anggota, pengurus maupun

dengan petugas/penyuluh.

4. Hadir pada pertemuan berkala dan aktif memberikan masukan, saran dan pendapat demi berhasilnya kegiatan usahatani kelompok. Soedijanto (1999).

2.2 Hasil penelitian yang relevan

Dalam peneliian ini penulis memaparkan tiga penelitian terdahulu yang relevan dengan permasalahan yang akan diteliti tentang pemberdayaan anggota kelompok tani aisgro di desa merpati dusun pauh kecamatan tangaran.

1. Skripsi yang ditulis oleh Nadra Yunia Ayuningtyas tahun 2014 mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta dengsn judul penelitian yaitu: tentang Keefektivan Program Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani) Dalam Meningkatkan Produksi Hasil Pertanian Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat Petani Desa Sumberagung Moyudan Kabupaten Sleman Yogyakarta Tahun 2014/2015.

Dalam Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatifkarena peneliti bermaksud mendeskripsikan, menguraikan dan menggambarkan keefektivan program Gapoktan dalam meningkatkan produksi hasil pertanian sebagai upaya pemberdayaan masyarakat petani di Desa Sumberagung, Moyudan, Sleman, Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan dengan mempertimbangkan objek penelitian sebagai suatu sistem, yaitu objek penelitian dilihat dari unit-unit yang terdiri dari faktor-faktor yang saling bergantung dan menggambarkan fenomena yang sedang terjadi. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa keefektivan program Gapoktan dalam meningkatkan produksi hasil pertanian di sebagai upaya pemberdayaan

masyarakat petani di Desa Sumberagung, Moyudan, Sleman, Yogyakarta dinyatakan berhasil. Keberhasilan ini diraih berkat program Gapoktan Desa Sumberagung yang mendukung dan mendukung usaha petani dan usahanya. Produksi pertanian rata-rata 5 ton/hektar sebelum Gapoktan dan 6,5 ton/hektar setelah Gapoktan. Pada akhir tahun 2013, Gapoktan di Desa Sumberagung mencapai targetnya dengan produksi pertanian sebesar 7,2 ton/hektar. Namun, karena penyebaran hama, serangga, dan cuaca yang tidak terduga, petani mungkin tidak dapat mencapai hasil yang diinginkan. Adapun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sekarang yang akan dilakukan oleh penulis adalah pada fokus masalahnya, dimana penelitian terdahulu meneliti Keefektifan Program Gapoktan (Gabungan Kelompok Tani) Dalam Meningkatkan Produksi Hasil Pertanian Sebagai Upaya Pemberdayaan Masyarakat Petaninya, sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah fokus pada proses pemberdayaannya. Subyek penelitian sebelumnya adalah ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), pengurus Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan), petani padi yang tergabung dalam Kelompok Tani. Sedangkan subyek penelitian yang dipilih penulis adalah masyarakat yaitu petani yang tergabung dalam program Kelompok Tani Campuran (Gapoktan), ketua Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) dan Kepala Desa.

2. Skripsi yang ditulis oleh Maf'idah tahun 2015 mahasiswa Universitas Negeri Semarang dengan judul penelitian yaitu: tentang Pemberdayaan Perempuan

Melalui Program Pertanian Terpadu (Studi kasus Kelompok Tani Wijaya Kusuma Desa Kedungsari Kecamatan Gebog Kabupaten Kudus tahun 2015). Penelitian ini menggunakan Metode penelitian kualitatif dengan model deskriptif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Pemberdayaan petani perempuan dapat dilihat dari beberapa pelaksanaan program seperti pembentukan kelompok tani, membangun komunitas dan persiapan lahan. Selama dalam tahap pelaksanaan program pertanian terpadu, setiap masyarakat yang terlibat akan melakukan tahapan mulai dari tahapan awal dan tahap akhir pengelolaan tanah, pemilihan benih, pembibitan, penanaman, pemupukan, perawatan, pengendalian hama dan penyakit, dan panen. Tahap ini juga dilakukan dengan menilai program pemberdayaan setiap perempuan bersama anggota kelompok melalui kesepakatan musyawarah mufakat. Partisipasi perempuan jika dianalisis menggunakan teknik analisis Longwe masih dalam taraf akses. Karena dalam berpartisipasi perempuan cenderung dikontrol oleh suami atau kepala keluarga. Partisipasi dalam program pertanian terpadu dikatakan sebagai cara karena memanfaatkan sumberdaya dan potensi yang ada di Desa Kedungsari untuk tujuan suatu program pemerintah yaitu perencanaan menu yang didalamnya terdapat suatu pemanfaatan lahan pekarangan sebagai pertanian terpadu. Yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sekarang yang akan dilakukan penulis adalah pada fokus masalahnya, dimana penelitian terdahulu meneliti bagaimana partisipasi pemberdayaan perempuan dalam program pertanian di Desa Kedungsari. Sedangkan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis adalah

fokus pada proses pemberdayaannya. Subjek penelitian terdahulu yaitu pengurus dan anggota kelompok tani, kepala Desa dan Dinas Pertanian sedangkan subjek penelitian yang dipilih oleh penulis yaitu masyarakat khususnya petani yang tergabung dalam program Gabungan Kelompok Tani, Ketua gabungan kelompok tani dan Kepala Desa.

1.3 Alur pikir penelitian

Penelitian yang berjudul “Pemberdayaan Kelompok Tani Melalui Usaha Tani Padi-Padian di Desa Merpati Kecamatan Tangaran Kabupaten Sambas” ini yang dimana meneliti tentang pemberdayaan yang sudah dilakukan oleh kelompok tani tersebut.

Maka fokus dalam penelitian yang di ambil adalah pemberdayaan kelompok tani melalui usaha tani padi-padian guna meningkatkan hasil produksi padi yang menurun di Desa Merpati Kecamatan Tangaran Kabupaten Sambas.

Adapun dari fokus penelitian yang di atas terdapat ada beberapa fakta yang terjadi di lapangan adalah. Hasil produksi pertanian di Desa Merpati mengalami penurunan. Kurangnya peran pemerintah dalam proses pengawasan kelompok tani di Dusun Pauh Desa Merpati. Kurangnya akses terhadap teknologi yang memfasilitasi para kelompok tani dalam melaksanakan kegiatan usaha tani Padi-padian di Dusun Pauh Desa Merpati Kecamatan Tangaran.

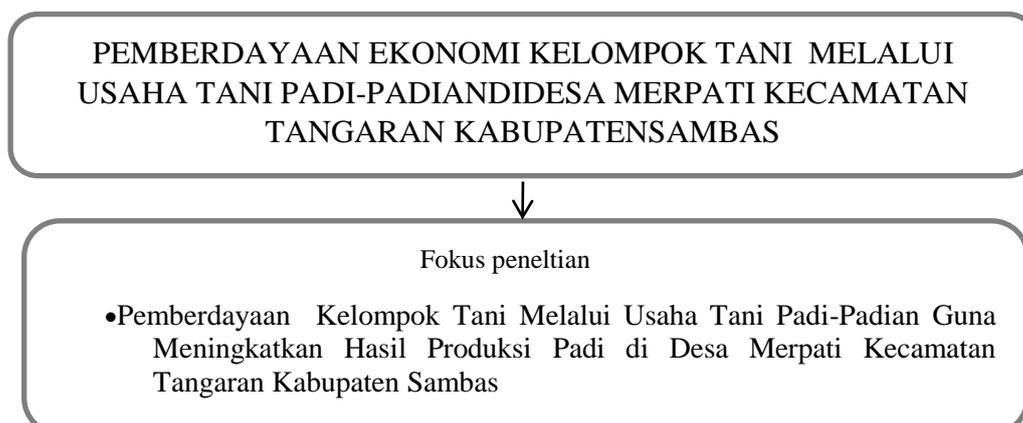
Menurut Shordlow pemberdayaan intinya membahas bagaimana individu, kelompok, ataupun komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka. Prinsip ini pada intinya mendorong klien untuk menentukan sendiri apa yang harus ia lakukan dalam kaitannya dengan upaya mengatasi permasalahan yang ia hadapi sehingga klien mempunyai kesadaran dan kekuasaan penuh dalam membentuk hari depannya (Isbandi

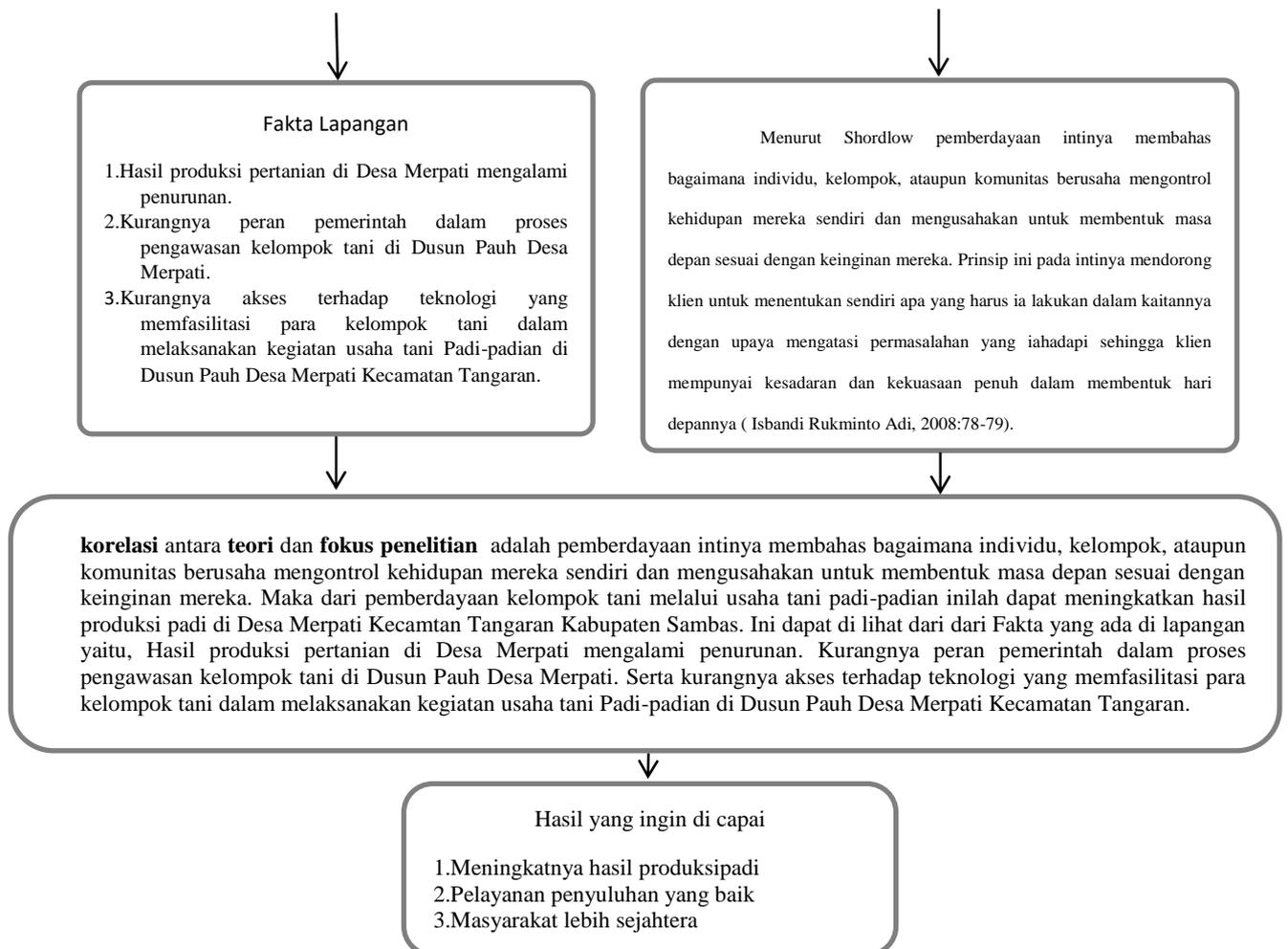
Rukminto Adi, 2015:78-79).

Jadi pemberdayaan yang dilakukan oleh kelompok tani tersebut dapat dilihat dari korelasi antara teori dan fokus penelitian adalah pemberdayaan intinya membahas bagaimana individu, kelompok, ataupun komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka. Maka dari pemberdayaan kelompok tani melalui usaha tani padi-padian inilah dapat meningkatkan hasil produksi padi di Desa Merpati Kecamatan Tangaran Kabupaten Sambas. Ini dapat di lihat dari dari Fakta yang ada di lapangan yaitu, Hasil produksi pertanian di Desa Merpati mengalami penurunan. Kurangnya peran pemerintah dalam proses pengawasan kelompok tani di Dusun Pauh Desa Merpati. Serta kurangnya akses terhadap teknologi yang memfasilitasi para kelompok tani dalam melaksanakan kegiatan usaha tani Padi-padian di Dusun Pauh Desa Merpati Kecamatan Tangaran.

Dari apa yang di bahas di atas tentang kelompok tani maka peneliti juga menganalisis hasil yang ingin di capai oleh kelompok tani tersebut, yaitu: Meningkatnya hasil produksi padinya, adanya Pelayanan penyuluhan yang baik, dan Masyarakat lebih sejahtera.

1.4 Kerangka Pikir Penelitian





Berbagai macam permasalahan yang terjadi di Kelompok tani Desa Merpati menjadi penghambat yang cukup besar pada proses pemberdayaan petani. Permasalahan tersebut antara lain seperti terlambatnya bantuan dari pemerintah seperti obat, pupuk dan bibit unggul dan rendahnya tingkat pendidikan petani, sehingga menghambat terjadinya proses pemberdayaan, maka dari itu dikeluarkan peraturan Menteri Pertanian Nomor 273/KPTS/OT.160/4/2007 tanggal 13 April 2007 tentang pedoman pembinaan kelembagaan petani yang diatur dalam UU No. 16 Tahun 2006 : Revitalisasi Pertanian, Perkebunan dan

Kehutanan (RPPK).

Kelompok Tani diharapkan anggota Kelompok tani mampu berorganisasi, dapat saling bertukar menukar informasi dengan sesama anggota kelompok tani lainnya atau dengan pengurus sehingga terjadi interaksi yang kontinue antar anggota kelompok tani maupun dengan pengelola. karena dengan adanya kelompok tani tersebut maka anggota kelompok tani mampu memperoleh informasi sehingga memperkaya pengetahuan anggota kelompok tani lainnya. Dari berbagai macam kegiatan kelompok tani diharapkan mampu meningkatkan hasil panen cabe rawit sehingga masyarakat di Desa Merpati lebih sejahtera.

2.5 Pertanyaan Penelitian

1. Bagaimana pemberdayaan kelompok tani dalam meningkatkan hasil produksi melalui usaha tani padi-padian di Desa Merpati Kecamatan Tangaran Kabupaten Sambas ?
2. Mengapa kelompok tani di Desa Merpati belum mengalami kemajuan dalam produktifitas usaha tani padi-padian ?